

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dan juga termasuk dalam negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan populasi hampir 270 juta jiwa pada tahun 2018 kemudian saat ini secara *de facto* Indonesia terdiri dari 34 provinsi.

Proses pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara optimal. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah selalu menetapkan target laju pertumbuhan didalam perencanaan dan tujuan pembangunannya. Selain pertumbuhan yang tinggi pembangunan daerah harus juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan setiap daerah atau wilayah pada dasarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Sejak tahun 2001 dilaksanakan otonomi daerah di Indonesia, kebijakan otonomi daerah di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga peranan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya. Kedua Undang-Undang ini memberikan kewenangan semakin luas kepada daerah untuk memberdayakan diri

terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan yang dimiliki dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara di Indonesia sendiri walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kesenjangan wilayah di Indonesia tidaklah terlalu besar apabila dibandingkan dengan negara lain yang mempunyai karakteristik yang sama.

Daerah yang relatif kaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan daerah-daerah yang penduduknya relatif miskin. Akibatnya ketimpangan pendapatan antara kabupaten/kota yang relatif kaya dengan yang lebih miskin menjadi besar. Tingkat kemiskinan yang masih lebih tinggi terjadi pada sektor-sektor seperti pertanian, karena pada sektor manufaktur dan jasa lebih tinggi tumbuh melampaui sektor pertanian di sejumlah kota besar di Indonesia.

Permasalahan yang dianggap paling rumit yang dihadapi bangsa Indonesia ada 5 hal yaitu korupsi, menyiapkan lapangan pekerjaan, kesenjangan sosial, kesenjangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia, baik itu negara miskin, maupun negara sedang berkembang, atau negara maju, yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.

Distribusi pendapatan merupakan sebuah unsur untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan

perbaiki suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya jika distribusi pendapatan tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai, hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

**Tabel I.1. Indeks Gini Indonesia**

<b>Pulau</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Sumatera</b>	0.342	0.35	0.357	0.346
<b>Jawa</b>	0.4	0.39833	0.405	0.40167
<b>Bali dan Nusa Tenggara</b>	0.37667	0.38	0.37	0.38667
<b>Kalimantan</b>	0.3725	0.3625	0.37	0.3625
<b>Sulawesi</b>	0.39833	0.39833	0.41333	0.39667
<b>Maluku dan Papua</b>	0.39	0.3975	0.39	0.38

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada tabel I.1 distribusi pendapatan di Indonesia pada tahun 2011 di pulau Sumatera berada paling rendah dengan indeks gini sebesar 0,342 dan tertinggi di pulau Jawa dengan indeks gini sebesar 0,4. Tetapi keadaan setiap pulau tidak berubah dimana pada tahun 2014 posisi terendah masih berada di pulau Sumatera dengan indeks gini sebesar 0,346 dan posisi tertinggi ada di pulau Jawa dengan indeks gini sebesar 0,401.

Lalu dapat dilihat dari tabel bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dari tahun 2011 sampai 2013 cenderung meningkat, kemudian ada penerunan pada tahun 2014. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Penelitian Jeanee B Nikijuluw (Nikijuluw, 2004, p. 6) menyebutkan pandangan Tambunan dalam mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan regional antara lain Konsentrasi kegiatan ekonomi

terpusat disuatu wilayah yang terlalu tinggi, kurangnya investasi, mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam antar daerah, perbedaan kondisi demografis dan kurang lancarnya perdagangan daerah.

Investasi merupakan salah satu yang mempengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia. Investasi di Indonesia terdapat dua jenis, yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal luar negeri (PMA). Dengan investasi akan mendatangkan devisa, uang, modal, dan lapangan pekerjaan. Namun jika investasi sangat banyak dalam proyek-proyek padat modal (*capital intensive*) saja, menjadikan presentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.

Indonesia masih mengalami sejumlah hambatan dalam melakukan penanaman investasi khususnya di daerah luar perkotaan, yang mana masih terhambat dalam kepastian hukum yang dikeluarkan oleh berbagai kalangan serta kecepatan dan kemudahan perizinin yang sampai saat ini sedang di proses untuk mengatasi permasalahan tersebut.

**Tabel I. 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri**

Pulau	PMA (dalam juta US\$)				PMDN (dalam miliar rupiah)			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
<b>Sumatera</b>	207.65	372.92	339.54	384.43	1814.91	1425.63	2291.38	2956.12
<b>Jawa</b>	2054.1	2276.65	2887.73	2572.8	6196.03	8782.17	11082.6	16176.2
<b>Bali dan Nusa Tenggara</b>	317.567	375.5	296.333	331.1	118.9	1055.93	1466.77	156.3
<b>Kalimantan</b>	479.725	802.15	681.9	1141.33	3366.85	4184.93	7172.8	5194.18
<b>Sulawesi</b>	119.217	251.167	249.683	342.617	1204.58	816.833	604.033	1185.58
<b>Maluku dan Papua</b>	371.65	333.3	683.875	381.45	359.925	106.1	667.733	168.733

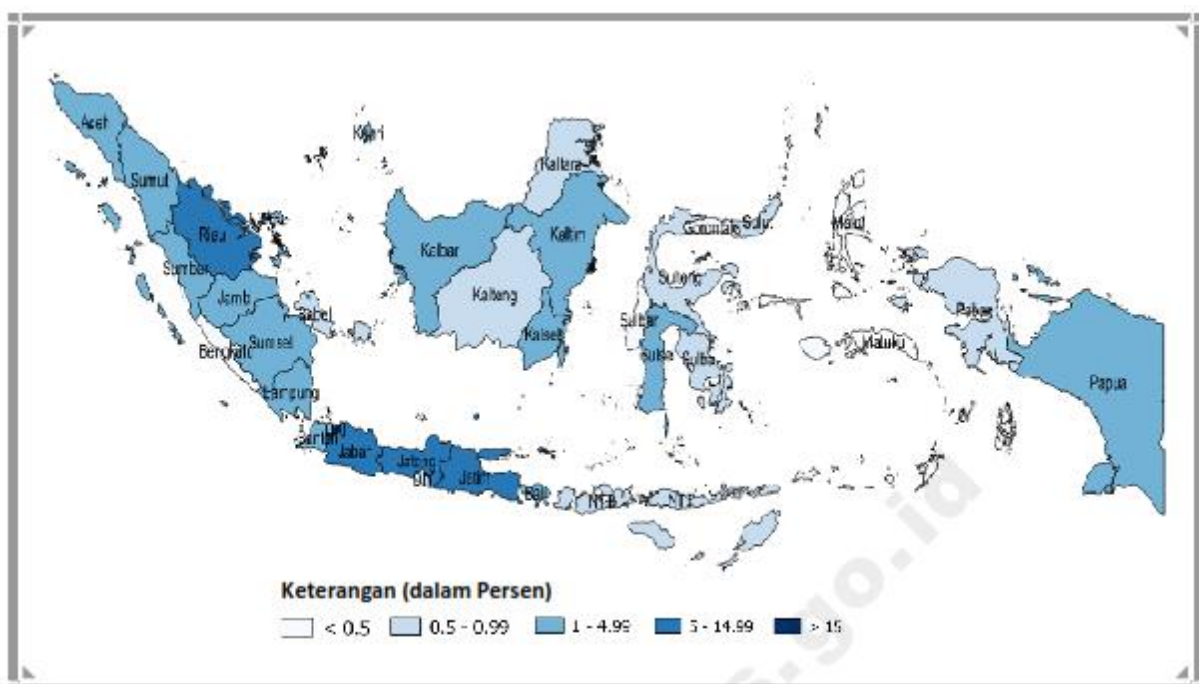
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dalam tabel I.2 jumlah investasi dalam penanaman modal asing/luar negeri di Indonesia setiap tahun juga meningkat pada tahun 2011 sampai 2014. Dengan pulau Jawa menempai posisi tertinggi mencapai angka US\$ 2054,1 dan posisi terendah berada di pulau Sulawesi dengan angka US\$ 119,217 Juta pada tahun 2011. Pada tahun 2013 terlihat bahwa beberapa daerah sempat mengalami penurunan kecuali pulau Maluku dan Papua, serta Jawa. Tetapi pada tahun 2014 kembali meningkat kecuali untuk pulau Maluku dan Papua yang mana malah menurun.

Pada tabel I.2 jumlah investasi dalam penanaman modal dalam negeri di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2014 justru cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2012 banyak daerah yang mengalami penurunan investasi, lalu naik pada tahun 2013, dan turun kembali pada tahun 2014, kecuali untuk pulau Jawa yang selalu naik. Pada tahun 2014 posisi tertinggi ditempati oleh pulau Jawa dengan mencapai angka Rp 16.176,2 Miliar rupiah. Lalu posisi terendah berada di pulau Bali dan Nusa Tenggara dimana hanya mencapai angka Rp 156,3 Miliar rupiah.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Investor masih susah dalam menanamkan modalnya di Indonesia terutama di daerah-daerah luar pulau Jawa. Hal itu terjadi karena di dalam pulau Jawa terdapat Ibukota Republik Indonesia dimana merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan perekonomian. Kemudian juga karena adanya permasalahan seperti sulitnya birokrasi untuk melakukan penanaman modal di daerah-daerah luar pulau Jawa .

Selanjutnya faktor yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan suatu negara. Secara agregat pertumbuhan ekonomi dilihat melalui pencapaian nilai total Produk Domesktik Bruto (PDB) suatu negara. Meskipun pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan suatu negara, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata.



**Gambar I.1**

**Peran Provinsi dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto 2014**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Gambar I.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 peran pulau Jawa dan Provinsi Riau merupakan yang paling tinggi diantara pulau dan provinsi lainnya dengan peran sekitar 5-14,99% dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB). Sedangkan pulau dan provinsi lainnya hanya berkontribusi sebesar 0-4,99%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan dimana daerah lain di luar pulau Jawa hanya sedikit memberikan peran

atau kontribusi dalam pembentukan PDRB. Sehingga tampak ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakatnya.

Inflasi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya mata uang. Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Inflasi di Indonesia sendiri berada dalam keadaan yang fluktuatif hal itu bisa terlihat dari keadaan inflasi tahun 2011 berada pada angka 3,79% kemudian terus naik sampai tahun 2013 mencapai 8,38% hingga pada tahun 2015 turun kembali menjadi 3,35%.

Pertumbuhan penduduk juga merupakan faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Sekarang jumlah penduduk di Indonesia sudah mencapai 255.641.700 jiwa pada tahun 2015. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada mencapai angka 1,36%, dengan laju pertumbuhan yang termasuk cukup tinggi tersebut dan jumlah penduduk yang tinggi maka kedepannya jumlah penduduk Indonesia akan semakin tinggi lagi. Hal itu akan menjadi masalah jika tidak dibarengi dengan tingginya kesempatan kerja dan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Kemudian pengangguran juga menjadi salah satu penyebab ketimpangan distribusi pendapatan. Pengangguran terjadi karena tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Jumlah pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2014 mencapai angka 7.244.905 jiwa.

Dari semua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan tersebut. Peneliti tertarik untuk meneliti tiga faktor, yaitu investasi dan pertumbuhan ekonomi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan diatas, maka beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh nilai tukar terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?



6. Apakah terdapat pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?

### **C. Pembatasan Masalah**

Menurut identifikasi masalah diatas, ternyata masalah ketimpangan distribusi pendapatan memiliki penyebab yang sangat kompleks. Dikarenakan keterbatasan yang dimiliki peneliti baik dari segi dana, waktu, dan tenaga, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah “Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia”.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. “Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia?”
2. “Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia?”
3. “Apakah terdapat pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia?”.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak pembaca baik secara teoritis maupun secara secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang perekonomian, serta sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh dari investasi dan pertumbuhan ekonomi serta implikasinya terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan pemerintah dalam menentukan arah dan strastegi pembangunan ekonomi di masa mendatang serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam mengantisipasi pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia.